

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dilaksanakan penulis pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah disertai dengan data, hasil observasi, dan hasil wawancara dengan narasumber yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Batanghari, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Batanghari dilaksanakan atas dasar kebutuhan barang/jasa setiap SKPD untuk memenuhi dan menjalankan program masing-masing SKPD. Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung pada Pemerintah Kabupaten Batanghari meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, dan serah terima hasil pekerjaan. Semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Batanghari dilaksanakan pada setiap tahapannya oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai tugas dan wewenangnya yang meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, dan penyedia.

- 2) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada Pemerintah Kabupaten Batanghari telah sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, dan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan persiapan pengadaan yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari sisi nilai pengadaan, Pemerintah Kabupaten Batanghari telah melaksanakan pengadaan langsung dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan, pekerjaan konstruksi, dan nilai paling tinggi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pengadaan jasa konsultasi.
- 3) Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah membuat pengadaan barang/jasa menjadi terhambat. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut.
- a. Sedikitnya usaha kecil yang ikut terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah karena tidak memiliki izin-izin usaha. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Batanghari menggalakkan dan mempromosikan pengurusan izin-izin usaha yang cepat dan gratis agar pengusaha kecil dapat ikut berperan sebagai penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- b. Kurangnya pemahaman penyedia terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah yang memanfaatkan teknologi. Terkait masalah ini, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengambil tindakan dengan mengadakan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis teknologi bagi pengusaha-pengusaha yang berminat untuk menjadi penyedia namun tidak paham dengan teknologi.